

Pemikiran Keagamaan & Kebangsaan Gus Dur

Oleh: Muh. Rusli

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

muhammadrusli@yahoo.com

Abstract

Gus Dur is a controversial and inspirational figure who has contributed brilliant ideas to religious life and nationality. To manifest religious life were fair and peaceful, the tap religion should be opened as wide as each religion entitled to the recognition of the country; Pluralism is a guarantee for every Indonesian to worship according to their religion or belief peacefully; In addition, the indigenization and contextualization of Islam, appreciate the culture and creativity of the nation itself. Indonesian Islam has own repertoire in appreciating the teachings of religion. In the context of a state, an ideology that can be accepted by all components of the nation and ensure the rights of all citizens is Pancasila; Furthermore, Democracy must be fought systemic and cultural continuously without radicalism.

Gus Dur merupakan tokoh kontroversial dan inspiratif yang telah menyumbangkan ide-ide cemerlangnya dalam konteks kehidupan keberagamaan dan kebangsaan. Menurutnya untuk mewujudkan kehidupan keberagamaan yang adil dan damai, maka keran agama harus dibuka selebar-lebarnya sebab setiap agama berhak mendapatkan pengakuan dari negara; Pluralisme adalah jaminan bagi setiap warga Indonesia untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya dengan rasa aman; Selain itu, pribumisasi dan Indonesianisasi adalah upaya kontekstualisasi ajaran Islam, menghargai hasil budaya dan kreatifitas bangsa sendiri. Islam Indonesia memiliki khasanah tersendiri dalam mengapresiasi ajaran agama. Dalam kontek kenegaraan, ideologi yang dapat diterima oleh seluruh komponen bangsa dan menjamin hak seluruh warga negara adalah ideologi Pancasila; selanjutnya, demokratisasi adalah kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Demokrasi harus diperjuangkan sistemik, kultural dan kontinyu tanpa radikalisme.

Kata Kunci

Pluralisme, pribumisasi, pancasila, dan demokrasi

Pendahuluan

K.H. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa dengan “Gus Dur” adalah salah satu tokoh reformis pemikir Islam kontemporer yang sering dikategorikan sebagai pemikir yang kontroversial, *nyeleneh*, cuek dan acuh. Dia bahkan dituduh sekuler, penghianat umat dan tidak membela kepentingan umat Islam.¹ Pemikirannya meliputi wacana hubungan agama dengan negara, demokratisasi, pluralisme, dan pribumisasi dan indonesianisasi Islam, merupakan pemikiran segar yang lahir dari refleksi atas pemahaman dan penghayatannya tentang Islam secara kontekstual.

Ide-ide yang disampaikan oleh Gus Dur menuai beragam respon dari masyarakat Indonesia yang telah lama terkungkung dengan kebijakan pemerintahan Orde Baru yang dibungkus dengan ide pembangunan. Belum lagi kebijakan politiknya ketika menjadi Presiden terkadang melawan arus besar, seperti penghapusan Departemen Sosial, membuka keran agama, sampai pada ide penghapusan lembaga DPR yang menurutnya tidak ada bedanya dengan Taman Kanak-kanak (TK), dan lain sebagainya.

Gus Dur adalah seorang tokoh yang tak pernah selesai. Meskipun jasadnya telah wafat pada 30 Desember 2009 silam, namun pemikiran dan ajaran beliau masih hidup sampai sekarang. Bahkan, banyak orang, baik Muslim maupun non-Muslim yang mengkaji dan mengamati pemikiran Gus Dur. Mengamati pemikiran Gus Dur memang menarik sekaligus menyulitkan. Menarik, karena idenya sangat sederhana, tetapi mampu menghujam wawasan tersendiri dalam menganalisis persoalan hidup di Indonesia maupun di dunia. Menyulitkan, karena pemikiannya kadang liberal, keluar dari kultur NU yang membesarkannya.

Gus Dur adalah salah seorang tokoh dari beberapa tokoh seperti Nurcholish Madjid, Ahmad Wahib dan Johan Effendi yang cukup koheren dan sempurna untuk disebut sebagai sebuah aliran pemikiran yang berdiri sendiri. Greg Barton menyebut para pemikir ini sebagai neo-modernis dan berpendapat bahwa aliran pemikiran ini telah menjadi instrumen dalam penciptaan posisi intelektual atau politik baru dalam pemikiran Islam di Indonesia. Ciri pemikirannya yang neo-modernis terlihat pada sikapnya yang menerima dan menghormati pluralisme dan nilai-nilai demokratisasi termasuk hubungan agama dan negara. Selain itu, nilai-nilai pluralistik telah dirujuk ke dalam struktur iman (Islam) sebagai nilai inti Islam itu sendiri.² Gagasan-gagasan yang dibangun merupakan ide yang aktual yang keluar dari *mainstream* bahkan

¹ Lihat Ulil Abshar Abdallah, “Kyai 'Mbeling' Jadi Presiden”, Tempo, 31 Oktober 1999.

² Lihat Greg Fealy dan Greg Barton, *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* terj. Ahmad Suaedy, dkk (Yogyakarta; LkiS, 1997), h. 195.

keluar dari kerangka pemikiran NU yang merupakan *background* kehidupan agama dan politiknya.

Cita-cita demokratisasi, persamaan hak, kebebasan berpendapat, dan menjunjung tinggi nilai pluralistik merupakan ide-ide pemikiran Islam Kontemporer yang dapat diapresiasi dan digali dari pemikiran Gus Dur. Untuk itu, pengkajian akan pemikiran Gus Dur merupakan hal yang menarik untuk dilakukan.

Riwayat Hidup Gus Dur

Abdurrahman Wahid nama aslinya adalah Abdurrahman Addhakhil, namun ia lebih populer dengan nama Gus Dur. Ia dilahirkan pada 4 Agustus 1940 di sebuah tempat yang kental dengan suasana kesantrian dan religi, Denanyar Jombang Jawa Timur, lokasi dimana Nahdlatul Ulama dilahirkan.³ Ayahnya yang sangat dicintai dan dikagumi dan banyak mewarisi sikap toleransinya, KH. Wahid Hasyim, adalah putra KH. Hasyim Asy'ari. Adapun ibunya Hajjah Sholihah adalah puteri sulung KH. Bisri Syamsuri. Baik nenek dari pihak bapaknya maupun dari pihak ibunya, kedua-duanya adalah tokoh besar dan pendiri Nahdlatul Ulama, sehingga keberadaan Gus Dur di NU mewakili keduanya.⁴

Adapun jenjang pendidikan yang dilewati oleh Gus Dur yakni Pada tahun 1953 sampai 1957 belajar di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Gus Dur tinggal di rumah Kyai Haji Junaid, seorang Kyai Muhammadiyah dan anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah. Beberapa tahun kemudian, ia mondok di Pesantren Tegalrejo, sebuah pesantren NU terkemuka di Magelang, Jawa Tengah di bawah bimbingan khusus KH. Chudhori dan Kyai ini pulalah yang memperkenalkan kepada Gus Dur amalan-amalan ritual dan mistik secara mendalam dalam Islam Jawa yang sampai hari ini tetap diamalkan. Kyai ini adalah antara lain sosok yang dikagumi Gus Dur karena sosok yang humanis. Di bawah bimbingan Kyai ini, Gus Dur kerap kali melakukan ziarah kubur ke beberapa wali di Jawa pada hari-hari tertentu, berdoa dan membaca al-Qur'an di Candimulyo. Ini semua merupakan pengalaman religius yang memperdalam dimensi spritualitas Gus Dur. Kemudian pada tahun 1957, ia sempat *nyantri* di Pesantren Krapyak, Yogyakarta dan tinggal di rumah KH. Ali Maksum. Tahun 1959 sampai 1963, Gus Dur belajar di Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, asuhan kakek

³ Ahcmad Fachruddin, *Gus Dur Dari Pesantren Ke Istana Negara* (T.tp: Yayasan Gerakan Amaliyah Siswa (GAS), 1999), h., XVII

⁴ lihat Humaidi Absussami dan Ridwan, *Biografi Lima Rais A'am Nahdlatul Ulama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995) h. 59-104. Lihat juga Imron Arifin, *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*, (Malang: Kalimasahada Press, 1993) h. 51-128

dari ibunya, KH. Bisri Syamsuri. Ketika itu, ia pun diminta mengajar santri-santriwati yang lebih muda termasuk Sinta Nuriyah yang kemudian diperistrikannya.⁵

Pada tahun 1964 bertepatan 23 tahun umurnya, Gus Dur meninggalkan tanah air menuju Kairo, Mesir, untuk belajar ilmu-ilmu agama di Ma'had al-Dirasat al-Islamiyyah yang berada di lingkungan al-Azhar Islamic University. Keberadaannya di lembaga pendidikan tertua di Timur Tengah ini menjadikan Gus Dur sangat kecewa dengan atmosfer intelektual di al-Azhar yang memadamkan potensi pribadi karena teknik pendidikannya yang masih bertumpu pada kekuatan menghafal, bahkan kekesalannya menjadi-jadi karena apa yang dipelajari di sana telah dihafal ketika ia berada di Pesantren Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah dan Krapyak Yogyakarta. Merasa tak pas dengan situasi dan teknik pengajaran dan pembelajaran di al-Azhar University ini, sebagai gantinya, ia menghabiskan waktu di salah satu perpustakaan yang lengkap di Kairo, termasuk American University Library, Dar al-Kutub dan Perpustakaan Universitas Kairo. Meski kecewa, ia tetap menikmati kehidupan kosmopolitan Kairo, bahkan beruntung karena terbukanya peluang-peluang untuk bergabung dengan kelompok-kelompok diskusi dan kegiatan tukar pikiran yang umumnya diikuti para intelektual Mesir. Yang perlu dicatat bahwa selama di Kairo, Gus Dur begitu tertarik pada film-film Perancis dan sepak bola, bahkan terkadang menonton film sampai dua atau tiga kali sehari. Di Kairo, Gus Dur aktif di mana-mana, termasuk di Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) untuk Timur Tengah sebagai Sekretaris Umum masa bakti 1964 hingga 1970. Akan tetapi hal ini tidak menjadikannya betah yang pada akhirnya terbang ke Baghdad tepatnya di Universitas Baghdad. Di Perguruan Tinggi ini Gus Dur melewatinya dengan penuh rasa bahagia karena mempelajari sastra Arab, filsafat dan teori sosial Eropa, selain itu, terpenuhi pula hobinya untuk menonton film-film klasik. Bahkan, sistem yang diterapkan di Universitas Baghdad ini, yang dalam beberapa segi dapat dikatakan lebih berorientasi Eropa daripada sistem yang diterapkan di Mesir.⁶

Pada tahun 1971, Gus Dur mampir ke Eropa dengan harapan memperoleh penempatan di sebuah Universitas, tapi sayang sekali ternyata kualifikasi-kualifikasi mahasiswa dari Timur Tengah tidak diakui di universitas-universitas Eropa. Inilah yang memotivasi Gus Dur pergi ke Mc Gill University, Kanada, untuk mempelajari kajian-kajian keislaman secara mendalam. Namun pada akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah terilhami

⁵"Presiden Umat, Presiden Rakyat, Presiden Santai," D&R, 25-31 Oktober 1999, h. 19-20.

⁶Lihat Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal Di Indonesia Pemikiran Neo Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad wahib, dan Abdurrahman Wahid*, terj Nanang Tahqiq (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 327

berita-berita menarik sekitar perkembangan dunia pesantren,⁷ termasuk berita hangat tentang politik tanah air.

Perjalanan Gus Dur di luar negeri berakhir pada Juni 1971. Pertama kalinya datang di Indonesia, ia bergabung di Fakultas Ushuluddin, UNHAS (Universitas Hasyim Asy'ari), Jombang sebuah Perguruan Tinggi Islam yang didirikan pada tahun 1969 oleh tokoh-tokoh NU. Di Perguruan Tinggi ini, Gus Dur mengajar Teologi dan beberapa mata kuliah agama lainnya. Pada tahun 1974, dia menjadi Sekretaris Pesantren Tebuireng Jombang. Masih tahun yang sama, terlihat pula keaktifannya sebagai penulis kolom dan artikel berbagai harian dan majalah, di samping itu sibuk pula sebagai pemakalah pada berbagai seminar dan diskusi,⁸ baik seminar yang sifatnya regional, nasional maupun internasional. Gus Dur pun kemudian terlibat dan terjun di dunia LSM, menjadi tenaga pengajar pada program training-training, termasuk juga untuk pendeta Kristen. Di LP3ES, Gus Dur bersama Dawam Raharjo, Aswab Mahasin, dan Adi Sasono dalam proyek pengembangan masyarakat pesantren. Pada perkembangan selanjutnya, Gus Dur bersama para Kyai yang dimotori oleh LP3ES mendirikan P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), suatu LSM yang sekarang intens melakukan *enlightenment* (memberi penerangan dan penjelasan terhadap berbagai fenomena keagamaan dan kemasyarakatan) terhadap para Kyai dan santri.⁹

Di saat angin reformasi berhembus yang melengserkan secara paksa Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun, Gus Dur tampil menjadi tokoh reformis bersama empat tokoh bangsa lainnya yaitu Megawati Soekarnoputeri, Muh. Amien Rais dan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang mengibarkan panji-panji reformasi yang dideklarasikan dengan nama Deklarasi Ciganjur. Kemudian pemerintahan BJ. Habibie membuka dan merealisasikan kesepakatan yang kemudian memberikan kebebasan kepada seluruh rakyat untuk mendirikan partai baru. Semangat ini mengilhami pula Gus Dur dan beberapa ulama NU lainnya mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada Mukthamar pertama di Surabaya akhir Juli 2000, Gus Dur terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa periode 2000-2005.¹⁰ Pada Sidang Umum MPR 1999, Gus Dur secara demokratis terpilih sebagai Presiden RI keempat. Sejak awal 1970-an hingga akhir 1990-an Gus Dur menghasilkan sekitar 494 buah tulisan.

Hubungan Agama dan Negara

⁷*Ibid*, h. 327-328

⁸Al-Zastrow Ngatawi, *Gus Dur Siapa Sih Sampeyan ? Tafsir Teoritik atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur*, (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 28

⁹ INGRES, *Beyond The Symbols: Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 20

¹⁰ "Para Tokoh Nasional Bertemu Lagi, Tingkatkan Persaudaraan", Kompas tanggal 21 Agustus 2000.

Dalam hubungan Islam dan negara, Gus Dur menjelaskan bahwa Islam tidak mengenal doktrin tentang negara. Doktrin Islam tentang negara adalah doktrin tentang keadilan dan kemasyarakatan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat doktrin tentang keadilan dan kemakmuran. Tak ada pula doktrin bahwa negara harus berbentuk formalisme negara Islam, demikian pula dalam pelaksanaan hal-hal kenegaraan.¹¹

Bagi Gus Dur negara adalah *al-Hukm* - hukum atau aturan. Islam tidak mengenal konsep pemerintahan yang definitif sehingga etik kemasyarakatanlah yang diperlukan. Karenanya menurut Gus Dur Islam tidak perlu diformalkan dalam kehidupan bernegara. Cukup apabila para warga negaranya memperjuangkan sumbangan dan peranan Islam secara informal dalam pengembangan demokrasi.¹²

Pemikiran Gus Dur tersebut sejalan dengan Pemikiran Qamaruddin Khan, Dosen Universitas Karachi, yang mengatakan bahwa tujuan al-Qur'an bukanlah menciptakan sebuah negara melainkan sebuah masyarakat, sehingga tidak adanya bentuk negara yang baku dalam Islam membawa hikmah tersendiri. Oleh karena itu, apa pun bentuk serta wujud suatu negara jika di dalamnya terbentuk sebuah masyarakat Qur'ani, maka itu pun sudah merupakan tanda-tanda negara Islam.¹³ Ketiadaan penjelasan resmi tentang negara memungkinkan Islam untuk mengikuti kemajuan zaman dan menyesuaikan diri terhadap kondisi dan lingkungan, tempat ia tumbuh dan berkembang.

Keinginan Gus Dur untuk tidak memformalkan Islam sebagai ideologi dan acuan formal dalam bernegara sejalan dengan keinginan sebagian besar warga negara yang mayoritas Islam.¹⁴ Tampak bahwa Gus Dur tidak memformalkan Islam dalam memperjuangkan Islam dalam negara yang bukan berasaskan Islam. Menurutnya, bangsa dan negeri ini bukanlah milik golongan Islam semata, tetapi juga selainnya.¹⁵ Hal ini juga sesuai dengan perjuangan pluralisme Gus Dur. Akan tetapi asas tunggal sudah tidak berlaku lagi, maka

¹¹ Wawancara D&R dengan Gus Dur, "Politik Sebagai Moral, Bukan Institusi" dalam *Tabayun Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 1998), h. 235.

¹² Abdurrahman Wahid, "Nasionalisme, Tasawwuf, dan Demokratisasi", dalam *Kompastanggal 2 April 2001*.

¹³ Asghar Ali Engineer, *Devolusi Negara Islam*, terj. Imam Muttaqin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 59.

¹⁴ Selain Gus Dur tokoh yang menghendaki ketidakformalan politik Islam seperti Nurcholish Madjid, M. Amien Rais, Dawam Raharjo. Generasi intelektual muslim ini mengembangkan apa yang disebut sebagai "Islam Kultural." Baca Bahtiar Effendy, *Repolitikasi Islam, Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?* (Bandung: Mizan, 2000), h. 191.

¹⁵ Abdurrahman Wahid, "Mencari Sintesa Agama-Negara" dalam YB. Sudarmanto, dkk, *H. Mathori Abdul Jalil, Dari NU untuk Kebangkitan Bangsa* (Jakarta: PT. Grasindo, 1999), h. XIV-XV.

perjuangan pluralisme yang lain yang diusahakan Gus Dur adalah perjuangan pluralitas agama. Maksudnya tidak bersikap diskriminatif terhadap agama selain Islam. Dalam negeri yang plural seperti Indonesia, harus diberi kesempatan menjalankan dan mengamalkan syariat agamanya sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing.

Kenyataan di atas bukan berarti bahwa bangsa Indonesia sebahagian besar berpaham sekuler dalam arti hendak memisahkan urusan agama dari negara tetapi tidak lebih pada keadaan kemajemukan latar belakang agama, budaya, suku, dan kelompok. Bahkan jika Indonesia menjadi negara Islam dan Islam diterima sebagai dasar negara, akan terjadi perpecahan di kalangan rakyat Indonesia karena tidak seluruh rakyat Indonesia umat Islam.

Berdasarkan pemikiran di atas, NU adalah organisasi Islam pertama yang menerima kehadiran Pancasila sebagai ideologi negara.¹⁶ Gus Dur dengan penuh keyakinan menjelaskan bahwa negara yang berideologi Pancasila termasuk negara damai yang harus dipertahankan, karena syariah dalam bentuk hukum agama, fikih, atau etika masyarakat masih dilaksanakan oleh kaum muslimin di dalamnya sekalipun hal itu tidak diikuti dengan legislasi dalam bentuk undang-undang negara. Bila etik kemasyarakatan dijalankan, tak ada alasan selain mempertahankannya sebagai kewajiban agama. Dari sanalah munculnya keharusan untuk taat kepada pemerintahan.

Gus Dur berusaha memberikan sinergi untuk memparalelkan hubungan agama dan negara. Dalam pemikirannya, ia melihat besarnya hambatan dalam proses pembangunan yang diakibatkan oleh kesalahpahaman yang sangat besar terhadap ideologi-ideologi negara yang sedang berkembang.¹⁷ Upaya Gus Dur ini tidak lepas dari peran bapaknya sebagai perumus konsep kenegaraan. Gus Dur menambahkan bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dan nasionalisme. Islam bisa berkembang secara spritual dalam sebuah negara nasional yang tidak secara formal berdasarkan pada Islam.

Gus Dur menjelaskan lebih lanjut bahwa Kejelasan soal pemilahan antara agama dan negara ini perlu dirumuskan lebih jauh, karena ketakutan akan hilangnya aspek-aspek keagamaan dari kehidupan pemerintahan kita itulah yang justru menimbulkan kebutuhan semu yang dirasakan sebagai sesuatu yang serius (oleh yang merasakannya) untuk melakukan formalisasi fungsi keagamaan dari pemerintah di bidang agama...¹⁸

¹⁶ Andree Feillard, *NU Vis A Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna* (Cet. Yogyakarta: LkiS, 1999), h. 233-261.

¹⁷KH. Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: LkiS, 1999), h. 2.

¹⁸KH. Abdurrahman Wahid, "Kata pengantar", dalam Einar M. Sitompul, *Nahdlatul Ulama dan Pancasila* (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), h. 15.

Dari penjelasan Gus Dur di atas, lantas muncul pertanyaan di mana peranan agama dalam perkara kenegaraan dan politik? Untuk hal ini Gus Dur secara tegas menggarisbawahi peranan agama sebagai etika sosial yang berarti Islam berfungsi komplementer dalam kehidupan negara. Memaksakan Islam pada fungsi suplementer dalam negara hanya akan menjadikan Islam tercerabut dari nilai-nilai fundamentalnya yang kondusif bagi tegaknya keadilan, egalitarianisme dan demokrasi.¹⁹ Hal ini belum banyak diangkat oleh pemikir Islam Indonesia lainnya. Sayangnya, Gus Dur tidak mengelaborasi visi etika sosialnya dalam bentuk yang lebih mapan. Islam berfungsi dalam kehidupan bangsa dalam dua bentuk. *Pertama* adalah akhlaq masyarakat (etika sosial) warga masyarakat, sedangkan bentuk *kedua* adalah partikel-partikel dirinya yang dapat diundangkan melalui proses konsensus (Undang-undang seperti undang-undang No. 1/1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Peradilan agama No.7/1989)²⁰

Dari sini jelas bahwa Gus Dur tidak pernah memimpikan sebuah negara yang menganut ideologi Islam secara formal tetapi nilai-nilai Islam tertanam dalam setiap pribadi muslim Indonesia. Cita-cita Gus Dur seperti ini menurut Soelastomo menjadi sebuah garansi bahwa Gus Dur akan berhasil memimpin Indonesia, karena wawasan keagamaan yang dimilikinya sarat dengan wawasan kebangsaannya.²¹

Etika sosial yang dikembangkan Gus Dur memunculkan pertanyaan, bagaimana pengaruhnya terhadap proses perjalanan pemerintahan. Soalnya, Gus Dur berada di luar pemerintahan bahkan sangat oposan terhadap segala kebijakan pemerintahan Orde Baru waktu itu. Sementara itu, apa yang disebutnya dengan partikel-partikel agama yang bisa masuk ke dalam negara dalam bentuk undang-undang oleh Gus Dur dijelaskan lebih lanjut bahwa Islam sebagai agama memberlakukan nilai-nilai normatif dalam kehidupan perorangan maupun kolektif para pemeluknya, sedangkan negara seperti republik Indonesia tidak akan memberlakukan nilai-nilai yang tidak diterima oleh semua warga negara, yang berasal dari agama dan pandangan hidup yang berlainan. Dengan kata lain, tidak semua nilai-nilai normatif yang dimiliki oleh Islam dapat diberlakukan dalam kehidupan bernegara kita di negeri ini.²²

¹⁹Umaruddin Masdar, *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Pancasila*, (Yogyakarta; Pustaka pelajar, 1999), h. 130.

²⁰KH. Abdurrahman Wahid "Islam, Ideologi dan Etos kerja Indonesia" dalam Budhy Munawar Rahman (Ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1994), h. 585.

²¹Soelastomo, "Dwi Tunggal Gus Dur-Mega," dalam Kompas, 29 Nopember 1999.

²²Wahid, "Islam, Ideologi dan Etos Kerja Indonesia", h. 583.

Dari uraian di atas tampak bahwa pemikiran Gus Dur tentang hubungan agama dengan negara semi sekuler²³ atau sekuler yang malu-malu.²⁴ Akan tetapi, istilah sekuler ini tidak diobral secara murah karena istilah ini masih tabu dan asing di telinga masyarakat dan bangsa Indonesia. Bahkan, Gus Dur lebih jauh mengatakan bahwa: Tidak semua nilai-nilai normatif yang dimiliki Islam dapat diberlakukan dalam kehidupan bernegara kita. Lalu di mana nilai-nilai normatif itu bisa berlaku secara utuh dan menyeluruh? Menurut Gus Dur hukum Islam dalam kenyataannya hanya berlaku sebagai panduan moral yang dilakukan atas dasar kesadaran masyarakat. Sementara kebutuhan mengundang hukum agama atau fikih hanya ada pada apa yang dapat diundangkan saja.²⁵

Upaya sebagian warga dan masyarakat Indonesia mengaktualisasikan Syariat Islam beserta hukum-hukumnya semakin mewarnai wacana diskusi tentang hubungan agama (Islam) dan negara. Apalagi saat ini setiap orang dan kelompok berhak mendirikan partai politik termasuk menjamurnya partai Islam.²⁶ Ada tiga responsi hubungan agama-negara, yaitu : responsi integratif, responsi fakultatif, dan responsi konfrontatif. Dalam responsi integratif, Islam sama sekali menghilangkan kedudukan formalnya dan sama sekali tidak menghubungkan ajaran agama dengan urusan kenegaraan. Hubungan antara kehidupan mereka dengan negara ditentukan oleh pola hidup kemasyarakatan yang mereka ikuti. Dengan kata lain, kalau mereka menjadi muslim yang sesuai dengan standar, itu terjadi karena latar belakang pendidikan dan kultural masing-masing. Untuk yang kedua, jika kekuatan mereka cukup besar di parlemen atau MPR, kaum muslimin/wakil-wakil gerakan Islam, akan berusaha membuat perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kalau tidak, mereka juga tak memaksakan, melainkan menerima aturan yang dianggap berbeda dari ajaran Islam. Sifat konfrontatif sejak awal menolak kehadiran hal-hal yang dianggap tidak Islami.²⁷

²³Masykuri Abdillah, *Agama dalam Pluralitas Masyarakat Bangsa*" Kompas, 25 februari 2000.

²⁴Kamaruddin Hidayat, "Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi," dalam Elza Peldi Taher (ed) *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi, Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), h. 179-180.

²⁵"Islam Dan Masyarakat Bangsa", Pesantren, No. 3 Vol. VI.

²⁶Mulyana W. Kusuma, *Menata Politik Paska Reformasi* (Jakarta: KIPP Indonesia, 2000), h. 28.

²⁷KH. Abdurrahman Wahid, "Kongres Umat Islam Mencari Format Hubungan Agama Dengan Negara" dalam Frans M. Parera dan T.Jakob Koekerits, *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman Kumpulan Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Presiden ke-4 Republik Indonesia*, (Jakarta: Harian Kompas, 1999), h. 23.

Dalam menjelaskan hubungan agama dengan negara, Gus Dur terbiasa sekali menghubungkan antara agama (Islam) dengan Pancasila. Pada hampir semua tulisannya, Gus Dur menegaskan pentingnya pemisahan antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi negara. Gus Dur meletakkan Pancasila sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan Islam menjadi aqidah dalam kehidupan Kaum Muslimin, dan bahwa antara ideologi sebagai landasan konstitusional tidak dipertentangkan dengan agama, tidak mencari penggantinya dan tidak diperlakukan sebagai agama.

Pancasila menurut Gus Dur juga sering diselewengkan oleh pihak penguasa. Untuk hal ini Gus Dur berargumen bahwa:

*“Pancasila adalah serangkaian prinsip-prinsip yang bersifat lestari. Ia memuat ide-ide yang baik tentang hidup bernegara yang mutlak diperjuangkan. Saya akan mempertahankan Pancasila yang murni dengan jiwa raga saya, terlepas dari kenyataan bahwa ia tak jarang dikebiri atau dimanipulasi, baik oleh segelintir tentara maupun sekelompok umat Islam.”*²⁸

Pernyataan loyalitas Gus Dur dan NU sebagai organisasi yang dipimpinnya terhadap Pancasila dan UUD 1945 dapat dilihat sebagai sebuah keprihatinan terhadap Pancasila yang makin diterjemahkan secara bebas dan atas nama demokratisasi padahal menginjak-injak Pancasila. Perdebatan tentang eksistensi Pancasila secara garis besar berupaya mempengaruhi substansi dari perdebatan politik nasional. Dengan menjadikan term negara, agama, dan Pancasila sebagai wahana menyatakan pikiran-pikiran dan pesan-pesannya, Gus Dur ingin membedakan dirinya dengan pihak lain yang memilih Islam untuk tujuan yang sama. Juga, boleh jadi bahwa Gus Dur menjadikan Pancasila sebagai alat untuk memperbaiki landas pijaknya di tengah gerakan Islam yang paling marak.

Demokratisasi

Menurut Gus Dur, ada tiga hal pokok demokrasi yaitu, kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Kebebasan adalah kebebasan individu sebagai warga negara dan hak kolektif dari masyarakat. Keadilan merupakan landasan demokrasi, dalam arti terbuka peluang bagi semua komponen masyarakat untuk mengatur hidupnya sesuai kehendak masing-masing. Oleh karena setiap orang punya hak dan kesempatan untuk mengatur hidup dan kehidupannya sehingga harus diberi jalan yang mudah dan tidak dipersulit, seperti beberapa kasus yang terjadi pada saat Orde Baru. Pokok demokrasi yang ketiga adalah *Syura* atau

²⁸ Douglas E. Ramage "Pemahaman Abdurrahman Wahid tentang Pancasila Dan Penerapannya" dalam Ellyasa KH. Dharwis, *Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta: LkiS, 1997), h. 101.

musyawarah, artinya bentuk atau cara memelihara kebebasan dan memperjuangkan keadilan itu lewat jalur permusyawaratan.²⁹

Gagasan demokratisasi Gus Dur telah dilempar ke publik jauh sebelum menjadi presiden RI. Dalam konteks kebangsaan Indonesia, Gus Dur memandang demokrasi sebagai suatu proses atau budaya yang terus menerus³⁰ dan tidak hanya diukur dari segi kelembagaannya saja seperti yang diterapkan selama Orde Baru. Gus Dur menjelaskan;

*“Ya kan mereka sudah ngomong sudah ada demokrasi dengan mengatakan sudah ada lembaganya. Ada MPR, ada DPR, BPK. Ya, semacam itulah. Namun saya sendiri beranggapan, demokrasi itu harus utuh, tidak hanya lembaga tetapi perilaku orangnya juga harus demokratis. Nyatanya perilaku kita nggak demokratis”.*³¹

Ungkapan Gus Dur di atas sebagai perlawanan terhadap rezim Orde Baru yang selalu mengklaim dirinya bersikap demokratis, padahal menciptakan undang-undang untuk menjerat siapa saja yang memberikan kritik. Hampir tidak ada orang yang berani mengemukakan kebenaran, walaupun ada yang berani pasti ujung-ujungnya korban. Bahkan anggota DPR-MPR sendiri selama 32 tahun, kehadirannya hanya menyanyikan lagu setuju dan setuju dalam setiap rapat.

Dari kasus seperti ini, Gus Dur sangat gusar dan tak pernah tenang melihat nilai luhur demokrasi terinjak-injak, padahal pengakuan rezim berkuasa, ia mewujudkan demokrasi. Kegusaran ini tampak dalam ucapan Gus Dur; ia mengatakan bahwa; di negeri kita demokrasi belum lagi tegak dengan kokoh, masih berupa hiasan luar yang bersifat kosmetis daripada sikap yang melandasi pengaturan hidup sesungguhnya. Dalam suasana demikian ini unsur-unsur masyarakat yang ingin melestarikan kepincangan sosial yang ada dewasa ini, tentu akan berusaha sekuat tenaga membendung aspirasi demokratis yang hidup

²⁹ Abdurrahman Wahid, “Sosialisasi Nilai-nilai Demokrasi,” dalam M. Masyhur Amin dan Moh. Najib (ed), *Agama Demokrasi dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: LKPSM, 1993), h. 90.

³⁰Nurcholish Madjid, “Demokrasi dan Demokratisasi di Indonesia: Beberapa Pandangan Dasar dan Prospek Pelaksanaannya Sebagai Kelanjutan Logis Pembangunan Nasional,” dalam Elza Peldi Taher (ed), *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi, Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), h. 203.

³¹Wawancara Wartawan Forum dengan Gus Dur dengan judul “Negeri Ini Kaya Dengan Calon Presiden” dalam *Tabayun Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 1998), h. 11.

di kalangan mereka yang telah sadar akan perlunya kebebasan ditegakkan di negeri ini.³²

Paradigma Gus Dur ini bukanlah sebuah bentuk ke-pesimis-an, karena akar-akar demokratisasi ini sudah tertanam sejak nenek moyang bangsa Indonesia dahulu. Hanya saja nilai-nilai luhur demokrasi itu disalahgunakan oleh pihak penguasa. Dengan demikian, penyalahgunaan itu harus terus menerus dikoreksi, di mana dan kapan saja. Itulah sebabnya, Gus Dur dalam memperjuangkan demokrasi tidak pernah lepas dari perjuangan sistemik, kultural dan kontinyu. Sistemik adalah berusaha menciptakan sistem sosial dalam masyarakat yang lebih demokratis, sebagai tandingan dari sistem politik otoriter dan a-demokratis seperti Gus Dur bersama Marsilam Simanjuntak, Bondan Gunawan, Rahman Tolleng membentuk Forum Demokrasi. Selanjutnya, kultural adalah demokratisasi dilakukan dengan membangun kultur baru yang lebih terbuka, toleran, dan menenggang perbedaan serta empati. Ini dibuktikan lewat dialog antar agama atau antar iman bersama tokoh-tokoh agama lain dan juga pembelaannya terhadap Pramudya Ananta Toer. Kontinyu adalah dilakukan secara terus menerus. Gus Dur melakukan hal ini tidak saja pada awal-awal reformasi tetapi jauh sebelum itu sudah mendengungkan pentingnya demokratisasi.

Sebagai seorang yang sangat berpegang pada cara-cara anti kekerasan, Gus Dur melakukan semua ini secara *gradual* dan menghindari konflik dan cara-cara yang radikal. Contoh ini diperlihatkan Gus Dur sebagaimana dikutip dalam al-Zastrow Ngatawi bahwa ketika arus deras reformasi berjalan dan kecenderungan radikal begitu kuat terjadi di kalangan masyarakat, Gus Dur justru diam dan tidak ikut. Hingga kemudian timbul asumsi bahwa Gus Dur tidak ikut reformasi.³³ Kalau hal ini dicermati bukan berarti bahwa Gus Dur tidak ikut demokrasi tetapi demokrasi harus dipahami bahwa tidak ada demokrasi yang sukses karena radikalisasi. Oleh karena itu, demokrasi butuh perjuangan keras. Sebab jangan salah pendapat, demokrasi sesungguhnya tidak mengobati apa-apa, tetapi ia hanya ingin meluruskan pemerintahan yang otoriter.³⁴

Dalam menegakkan demokrasi menurut Gus Dur tidak bisa menghindari omongan yang tidak enak bahkan kontroversi menurutnya adalah

³²Dikutip dalam Ahmad Amir Aziz, *Neo-Modernisme Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), h. 71.

³³*Ibid*, h. 259.

³⁴J. Kristiadi, "Sang Politikus pembangun Demokrasi," dalam INcRES, *Beyond The Symbols Jejak Antropologis Pemikiran Dan Gerakan Gus Dur* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), h. 159.

esensi demokrasi.³⁵ Dari sini tampak bahwa adalah suatu kepantasan apabila Gus Dur tetap konsisten membuat dan mengeluarkan berbagai pernyataan-pernyataan kontroversial yang sesungguhnya tidak boleh dikeluarkan oleh seorang presiden, tetapi karena adanya keyakinan bahwa perbedaan dan kontroversi itu adalah hakekat dan esensi demokrasi, hal itu tetap dilakukan. Banyak pernyataan yang dikeluarkan misalnya, keinginannya untuk membuka hubungan dagang dengan pihak Israel, padahal Israel adalah sebuah negara yang menginjak-injak bangsa Muslim, demikian pula pernyataan-pernyataan yang bernada mendukung pihak Kristen dan mendiskreditkan umat Islam.

Menurut Gus Dur dalam masyarakat demokratis; 1) semua warga negara kedudukannya sama di muka hukum, 2), yang berperan adalah kedaulatan hukum bukan kedaulatan kekuasaan, 3), kebebasan berpendapat dibuka seluas-luasnya, dan 4), adanya pemisahan yang tegas dalam fungsi yang tidak boleh saling mempengaruhi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.³⁶ Disebutkan pula sebuah negara yang demokratis adalah yang mampu menjamin hak-hak dasar manusia, yang meliputi:1). jaminan keselamatan fisik; 2). jaminan keselamatan keyakinan agama; 3). jaminan kehidupan keutuhan rumah tangga; 4). jaminan keselamatan hak milik; dan 5). jaminan keselamatan akal.³⁷

Nilai demokratisasi menurut Gus Dur perlu dilakukan secara kontinyu, sebab tanpa itu mustahil demokrasi akan berjalan. Cara-cara pensosialisasiannya menurut Gus Dur adalah sebagai berikut: *Pertama*, diupayakan untuk menerapkan kepada rakyat, kepada masyarakat umum tentang pentingnya nilai-nilai dasar demokrasi untuk kepentingan mereka. Ini merupakan pendekatan normatif. *Kedua*, pendekatan empirik, pendekatan yang sifatnya membangun kesadaran tentang nilai-nilai demokrasi dari praktek pengalaman.³⁸

Berbagai tindakan dan manuver kontroversial yang dilakukan Gus Dur, sesungguhnya cermin dari sikap konsistensinya pada nilai-nilai demokrasi. Gus Dur lebih setia pada prinsip daripada cara. Oleh karena kesetiannya pada prinsip ini, ia berani menentang cara-cara yang bertentangan terhadap prinsip, meski cara itu telah menjadi arus besar yang dilakukan masyarakat. Secara lahiriah, Gus Dur memang tidak konsisten dan terkesan plin-plan, lari ke kiri dan ke kanan. Namun jika kita cermati secara arif dan seobyektif mungkin dengan melepas ikatan Jawa- non Jawa, NU-non NU, pendukung Habibie-non Habibie, kawasan Timur-non Timur, kita akan dapat mengetahui bahwa sikap

³⁵Wawancara Wartawan Tempo dengan Gus Dur dengan judul "Kami Tidak Menyusun Kekuatan" dalam *Tabayun Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 1998), h. 70-71.

³⁶Wawancara wartawan Tiara dengan Gus Dur dengan judul "Saya jadi Presiden Ha.Ha.Ha..." dalam *Tabayun Gus Dur* (Yogyakarta: LkiS, 1998), h. 93.

³⁷ Abdurrahman Wahid, *Sosialisasi Nilai-nilai demokrasi*, h. 97-98.

³⁸ *Ibid*, h. 100.

yang seperti itu justru menunjukkan konsistensinya dalam berdemokrasi. Bukankah hak siapa saja menyatakan pendapat- terlepas presiden atau rakyat- adalah bagian dari prinsip demokrasi.

Pluralisme

Pluralitas dalam kenyataan adalah terjadinya keanekaragaman dalam berbagai bentuk baik bentuk kedaerahan, kebudayaan, keagamaan, kesukuan, dan adat istiadat. Saat ini menurut Amin Abdullah, sangat sulit untuk mempertahankan paradigma tunggal dalam wacana apapun, semuanya serba beraneka ragam dan semuanya harus dipahami secara *multidimensional approach*.³⁹

Islam mengakui kenyataan-kenyataan plural dikategorikan sebagai fitrah dan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Swt bagi seluruh manusia. Manusia tidak pernah menjadi hanya satu tipe dan persamaan yang terus menerus tetapi diwarnai oleh berbagai hal yang menyebabkan munculnya perbedaan. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah, QS. Hud (11): 118-119.

Membicarakan pluralisme, Gus Dur tak jarang menghubungkannya dengan agama, karena agama inilah yang sering dipolitisir, dimanfaatkan, dan dijadikan alasan oleh mayoritas dalam menindas dan menekan secara diam-diam kaum minoritas. Pandangan Gus Dur terhadap pluralisme tercermin pada sikapnya yang terlalu sering membela kaum minoritas termasuk etnis Cina dan non-Muslim dengan memberikan peluang-peluang kepada mereka untuk mendapatkan posisi strategis dalam negara. Contoh ketika pemimpin tabloid Monitor Arswendo Atmowiloto menempatkan Nabi Muhammad saw pada urutan ke- 11 di antara tokoh Indonesia dan dunia. Umat Islam secara spontan bereaksi dan meminta agar SIUPP tabloid ini dicabut, lalu Gus Dur mengatakan;

Saya tidak setuju dengan pencabutan SIUPP apapun. Bawalah ke pengadilan, itulah penyelesaiannya yang terbaik. Bung Karno zaman kolonial dia dihukum oleh pemerintah kolonial, tapi dia membuat pledoi dalam *Indonesia Menggugat*, dan itu yang menjadi pegangan hidup bangsa kita saat ini⁴⁰

Dengan demikian, tampak bahwa Gus Dur memberikan pelajaran kepada rakyat untuk menghargai otoritas pengadilan dan tidak bertindak menghakimi sendiri. Lagi pula seakan-akan mayoritas ini ingin menghancurkan Arswendo dengan dalih penghinaannya lewat tabloid Monitor, padahal hanya

³⁹Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 45.

⁴⁰Wawancara Wartawan Editor dengan Gus Dur dengan judul "Kasus Monitor Yang Marah Cuma Sedikit" dalam *Tabayun Gus Dur* (LKIS, 1998), h. 63.

sentimen karena Arswendo bukanlah seorang Muslim tetapi Kristen. Lebih lanjut Gus Dur mengatakan:

*"Saya ingin Muslimin ini mendewasakan diri dalam pandangan agama mereka sendiri dan melakukan hal-hal yang konstruktif, pemekaran cakrawala umat, pembinaan kembali akhlak umat hingga mencapai keseimbangan optimal antara emosi dan rasio"*⁴¹

Adapun mengenai buku Salman Rusydi yang menjadi perdebatan, Gus Dur tampak memberikan pembelaan ketika umat Islam dunia termasuk Indonesia memperlihatkan emosi terhadap munculnya buku ayat-ayat setan hasil karya Salman Rusydi, Gus Dur mengatakan;

*"Saya tahu bukunya Salman itu menghina, main-main dan saya betul marah membaca buku itu. Tapi, bagaimana pun juga hak mengatakan pendapat itu, sesuatu yang sangat berharga. Ini yang juga oleh Islam. Lho, kok tahu-tahu kita tanpa mengadilinya dengan tepat, langsung hukuman mati "in absentia". Itu kan emosional."*⁴²

Tindakan menentang yang dilakukan Gus Dur untuk menunjukkan kepada minoritas di negeri ini bahwa suara mereka itu - orang galak - bukan representasi Islam. Tampak bahwa Gus Dur menjunjung tinggi nilai Islam dan berusaha agar orang lain tidak menaruh curiga terhadap Islam.

Wajar saja jika banyak yang menaruh curiga bahwa pertumbuhan Islam kini menuju kepada kelompok sektarian. Menjadi suatu yang membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Isu semacam pribumi dan non-pribumi maupun Kristenisasi, sebenarnya muncul dari semangat sektarianisme, padahal hidup ini dalam pluralisme. Pluralisme terjaga kalau ada demokrasi.⁴³

Toleransi dan transparansi Gus Dur terhadap semua golongan menyebabkan bisa bergaul dengan semua kalangan, mulai kalangan nasionalis, tokoh agama, dan sosialis. Keyakinan agama Gus Dur yang kuat sehingga tak pernah khawatir dan curiga terhadap niat jelek kelompok lain. Gus Dur pada suatu kesempatan ketika menghadiri perayaan Natal di Balai Sidang Senayan mengatakan bahwa;

"Saya adalah seorang yang meyakini kebenaran agama saya. Tetapi ini tidak menghalangi saya untuk merasa bersaudara dengan orang yang beragama lain di negeri ini, bahkan dengan sesama Umat manusia. Sejak kecil itu saya rasakan, walaupun saya tinggal di lingkungan Pondok

⁴¹*Ibid*, h. 64.

⁴²*Ibid*, h. 62.

⁴³Abdurrahman Wahid, "Islam, Pluralisme, dan Demokratisasi", dalam Arief Afandi, *Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur-Amien Rais* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 119.

*Pesantren, hidup di kalangan keluarga Kyai. Tetapi tidak pernah sedikit pun saya merasa berbeda dengan yang lain.”*⁴⁴

Komitmen memandang seseorang dari sisi kemanusiaannya yang sering diperlihatkan Gus Dur tidak lepas dari ajaran agama Islam yang terkandung dalam al-Qur'an QS. al-Isra' (17) :70. Ditambah juga dari fatwa yang diambilnya dari mantan Rais Am PBNU KH. Ahmad Shiddiq yang juga sama-sama Gus Dur menjadi pimpinan teras PBNU hasil muktamar 1983 Situbondo yaitu *Ukhuwah Insaniyah* (Persaudaraan Kemanusiaan) dan *Ukhuwah Wathaniyah* (Persaudaraan Kenegaraan).⁴⁵ Dengan demikian, manusia hendaknya tidak dipandang kecuali ia dipandang sebagai manusia yang dimuliakan Allah. Itu artinya bahwa antara umat Islam, Kristen, dan apapun agamanya, pada dasarnya adalah manusia yang harus dimuliakan dan dihormati.

Wawasan kebangsaan dan komitmen keIndonesiaan yang dimiliki Gus Dur termasuk dalam masa kepemimpinannya di NU bersama KH. Ahmad Shiddiq sehingga ia cepat menerima Pancasila sebagai satu-satunya dasar dan ideologi negara. Sedangkan Ukhuwah Islamiyah sebagai persaudaraan intern sesama pemeluk Islam. Pada bagian lain Gus Dur mengatakan bahwa;

*“Kalaupun ada yang mencoba memisahkan kita, kita semua harus sadar bahwa persaudaraan yang lebih besar di antara kita memanggil kita bersama-sama untuk meyakini Tuhan masing-masing dengan cara sendiri-sendiri. Karena itu, saya tidak pernah merasa terasing dari saudara-saudara yang beragama lain, Hindu kah, Kristen kah, Budha kah, bahkan terus terang saja, sampai hari ini, saya pun masih menghadapi masalah berat mengenai nasib Konghucu di Indonesia. Ini benar-benar yang menyentuh perasaan. Bahwa di negeri yang demikian kaya, di negeri yang demikian menghargai perbedaan, di negeri yang begitu banyak manifestasi kebudayaannya, justru kita mulai terjangkau kuman perbedaan di antara kita semua. Ini tidak boleh terjadi.”*⁴⁶

Pandangan Gus Dur ini mengisyaratkan bahwa meski agama itu mengandung ajaran tunggal, namun karena ia dipahami oleh umat yang berbeda latar belakang pengetahuan dan agama maka pada akhirnya muncul penafsiran masing-masing yang terkesan saling menyalahkan.

Gus Dur berpikiran bahwa tidak semua simbol dan ritus itu sebagai sesuatu yang bisa dianggap sebagai suatu ajaran yang harus dijaga dan

⁴⁴ “Pidato Natal Gus Dur: Tak sedikit Pun Saya merasa Berbeda” Kompas, 28 Desember 1999. Baca pula pidato Gus Dur pada saat mengunjungi Institut Mahatma Gandhi di Denpasar Bali dalam Republika, tanggal 25 Oktober 1999/15 rajab 1420 H.

⁴⁵ Abdurrahman Wahid, “In Memoriam Kyai Achmad Siddiq”, dalam Munawar Fuad Nuh dan Mastuki HS, *Menghidupkan Ruh Pemikiran KH. Achmad Siddiq* (Jakarta: Logos, 1999), h. 26.

⁴⁶*Ibid*

dipertahankan, di dalam agama ada dimensi kebudayaan yang kadang juga menjelma dalam bentuk simbol dan ritus. Sebenarnya umat beragama memiliki kebebasan untuk mengubah simbol dan ritus yang menjadi bagian dari dimensi kebudayaan agama. Untuk mendinamisir agama agar nilai-nilai agama tetap relevan dengan realitas zamannya, dan agar agama memiliki fungsi yang maksimal dalam menjawab problem kehidupan, Gus Dur mencoba melakukan pembaharuan penafsiran dan pembongkaran simbol-simbol agama yang mengalami stagnasi tanpa mengubah esensi ajaran agama.

Pribumisasi dan Indonesianisasi Islam

Ide pribumisasi yang dilontarkan Gus Dur adalah tidak lebih pada usaha penerjemahan Gus Dur tentang Islam secara kontekstual. Islam haruslah ditilik dari fungsinya sebagai pandangan hidup yang mementingkan kesejahteraan warga masyarakat, apapun bentuk masyarakat yang digunakan, masyarakat Islami atau bukan. Gus Dur tidak menjadikan Islam sebagai alternatif. Segenap ajaran agama yang telah diserap oleh kultur lokal tetap dipertahankan dalam bingkai lokalitasnya. Menurutnya, manusia tak bisa beragama tanpa budaya, karena kebudayaan merupakan kreatifitas manusia yang bisa menjadi salah satu bentuk ekspresi keberagamaan. Tetapi tidak bisa disimpulkan bahwa agama adalah kebudayaan. Di antara keduanya terjadi tumpang tindih dan saling mengisi namun tetap memiliki perbedaan.⁴⁷ Inilah yang disebut pribumisasi yang pada intinya mengokohkan kembali akar budaya, dengan tetap berusaha menciptakan masyarakat yang taat beragama.⁴⁸

Ideologi Islam bergerak pada level bahasa, kultur, politik, dan pemikiran. Demikian pula ide pribumisasi ideologi (baca: Pancasila) juga bergerak pada level-level tersebut. Pada level bahasa, ia menyetujui saja beberapa kata untuk di Indonesiakan. Misalnya *Assalamu alaikum*, menurut Gus Dur boleh saja diganti dengan selamat pagi, selamat malam, ataupun selamat sore. *Assalamu alaikum* sama saja orang Arab mengucapkan *shabahu al-khaer* yang bisa bermakna selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Menurut Gus Dur, cara seperti ini menampung dua representasi, representasi adaptasi kultural kepada adat istiadat di satu pihak dan representasi untuk memelihara ajaran formal agama di pihak lain.⁴⁹ Atau lebih tegas alasannya, Gus Dur mengatakan sebetulnya maksud saya begini, bentuk-bentuk ekspresi yang normatif atau legal formalistik dengan bentuk kultural, belum tentu harus

⁴⁷ Abdurrahman Wahid, "Pribumisasi Islam" dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Shaleh (Ed), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, (Jakarta: P3M, 1989), h. 81.

⁴⁸ *Ibid*, h. 96.

⁴⁹ Abdurrahman Wahid "Merelevansikan Bukannya menghilangkan Salam" dikutip dalam Dedy Djamiluddin Malik dan Idy Subandi Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia*, h. 180.

sejalan. Dalam Shalat misalnya, *assalamu alaikum* itu tidak bisa diganti karena merupakan bentuk normatif. Tapi yang kultural bisa, contohnya ucapan atau sapaan".⁵⁰

Selain di atas, Gus Dur juga tidak setuju dengan gerakan arabisasi budaya yaitu formalisasi ajaran Islam dengan budaya, yakni menjadikan Islam sebagai tolak ukur ideal untuk menilai manifestasi budaya pada umumnya. Misalnya, ulang tahun diganti dengan milad, teman atau sahabat dengan ikhwan, sembahyang dengan shalat. Pendek kata seakan-akan tidak terlalu islami seseorang apabila memakai istilah lain selain bahasa aslinya (baca: Bahasa Arab).

Hal lain yang mendapat kritikan dari Gus Dur adalah masjid beratap genteng yang sarat dengan simbolisasi lokalnya sendiri di negeri kita dituntut untuk dikubahkan. Budaya walisongo yang serba jawa, seudati aceh, tabut Pariaman didesak ke pinggiran oleh kasidah berbahasa Arab dan juga MTQ yang berbahasa Arab. Bahkan ikat kepala lokal harus mengalah kepada sorban merah putih model Yasser Arafat. Begitu juga hukum agama, harus diseragamkan dan diformalkan. Harus ada sumber pengambilan formalnya, al-Qur'an dan hadis, padahal dahulu cukup kata Kyai. Pandangan kenegaraan dan ideologi politik tidak kalah dituntut universal. Yang benar hanyalah Sayyid Qutub, Abul A'la al-Maududi, atau Imam Khomaeni. Pendapat lain yang sarat dengan latar belakang lokal masing-masing mutlak dinyatakan salah. Lalu dalam keadaan demikian, tidakkah kehidupan kaum Muslimin tercabut dari akar-akar budaya lokalnya? Tidakkah ia terlepas dari kerangka kesejarahan di masing-masing tempat? Di Mesir, Suriah, Irak, dan Aljazzair, Islam dibuat menentang nasionalisme Arab - yang juga masing-masing bersimpang siur warna ideologisnya".⁵¹

Usaha-usaha ini dilakukan sebagai upaya mempertemukan budaya (*al-'adah*) dengan norma syariah. Dan sebagai suatu pemahaman Islam yang mempertimbangkan kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa merubah hukum itu sendiri. Pribumisasi Islam bukanlah suatu upaya meninggalkan norma budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman nash, dengan tetap memberikan peranan kepada *ushul al-fiqh* dan *qawaid al-fiqh*.

⁵⁰Wawancara Wartawan dengan Gus Dur dengan judul "Lebih jauh dengan KH. Abdurrahman Wahid" dalam *Tabayun Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 1998), h. 148.

⁵¹ Abdurrahman Wahid "Salahkah Jika Dipribumikan" dalam Syu'bah Asa dan Ulil Abshar Abdallah, *Melawan Melalui Lelucon: Kumpulan Kolom Abdurrahman Wahid di Tempo* (Jakarta: Pusat data dan Analisa Tempo, 2000), h. 63.

Pembauran Islam dengan budaya tidak boleh terjadi, sebab berarti hilangnya sifat-sifat asli. Islam harus tetap pada sifat keislamannya. Al-Qur'an harus tetap dalam bahasa Arab, terutama dalam Shalat, sebab hal itu telah merupakan norma. Sedangkan terjemahan al-Qur'an hanyalah dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman, bukan menggantikan al-Qur'an itu sendiri.

Perjuangan mempertahankan nilai-nilai lokal, di samping sebagai menjunjung tinggi kreatifitas bangsa sendiri, juga tidak lebih pada tingginya semangat nasionalisme yang digelorakan Gus Dur. Apa yang diperjuangkan itu hingga hari ini sebagian besar tetap dalam bingkai budaya, seperti nama lembaga pendidikan NU, tidak beralih status, tetap memakai nama dan istilah Jawa "Pesantren", *Mudarris* atau *Ustadh* dengan istilah Kyai, dan santri hasil terjemahan dari *thalib* atau *tilmidz*. Juga para Kyai-kyai NU tetap setia memakai songkok atau peci nasional warna hitam dan bukan songkok putih (songkok haji) seperti yang selama ini diperlihatkan oleh Gus Dur. Bahkan saat ia menjadi presiden, Gus Dur jarang sekali memakai baju safari atau jas sepasang (pakaian internasional) tetapi ia lebih memilih memakai batik Jawa. Ini semua berbeda dengan tokoh-tokoh nasional lainnya yang lebih bangga dan lebih percaya diri memakai pakaian internasional..

Sesungguhnya pribumisasi yang digulirkan Gus Dur adalah upaya kontekstualisasi ajaran Islam. Kontekstualisasi yang berujung pada proses pribumisasi itu adalah tawaran untuk memberikan peta bagaimana seharusnya Islam dikembangkan di tengah masyarakat. Pendekatan pribumisasi ini bukan antipati dari puritanisme dan legalisme yang ditawarkan oleh sebagian tokoh dan cendekiawan Muslim tetapi tidak lebih pada usaha menghargai hasil budaya dan kreatifitas bangsa sendiri.

Penutup

Pokok-pokok pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid sangat inspiratif dalam menyelesaikan berbagai problem keagamaan dan kebangsaan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Baginya, doktrin Islam tentang negara adalah doktrin tentang keadilan dan kemasyarakatan. Untuk itu, ideologi yang relevan bagi Indonesia adalah ideologi Pancasila; selain itu, demokrasi adalah kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Demokrasi harus diperjuangkan sistemik, kultural dan kontinyu tanpa radikalisme; Untuk itu, pluralisme adalah jaminan bagi setiap warga Indonesia untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya dengan rasa aman. Pluralisme dapat dibangun dengan kerangka *Ukhuwah Insaniyah* (Persaudaraan Kemanusiaan), *Ukhuwah Wathaniyah* (Persaudaraan Kenegaraan). d) Pribumisasi dan Indonesianisasi, adalah upaya kontekstualisasi ajaran Islam, menghargai hasil budaya dan kreatifitas bangsa sendiri. Islam Indonesia memiliki khasanah tersendiri dalam mengapresiasi ajaran agama.

Menyikapi pokok-pokok pikiran Gus Dur, maka wajar jika ia dikategorikan sebagai pemikir Islam yang inspiratif. Pengharganya dan penerimaan terhadap pluralisme dan nilai-nilai demokratisasi termasuk hubungan agama dan negara. Selain itu, nilai-nilai pluralistik telah dirujuk ke dalam struktur iman (Islam) sebagai nilai inti Islam itu sendiri. Baginya itulah Islam, agama yang berfungsi untuk memberikan solusi bagi setiap persoalan umat tetapi sebaliknya agama justru menjadi problem bagi umat. Gagasan-gagasan yang telah dibangun oleh Gus Dur banyak menginspirasi kalangan muda Indonesia untuk keluar dari belenggu sebagaimana Gus Dur terkadang keluar dari pemikiran NU yang membesarkannya. Pemikiran Gus Dur juga telah membawa angin segar bagi kehidupan beragama di Indonesia, hak-hak minoritas pun mulai diperhatikan. Lahirnya gagasan kearifan lokal sebagai solusi konflik merupakan bukti bahwa dewasa ini penghargaan kepada sesuatu yang sifatnya lokal/minoritas kini telah mendapat pengakuan, bahkan dianggap bisa menjadi solusi di tingkat nasional di tengah banyaknya persoalan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, Ulil Abshar. "Kyai 'Mbeling' Jadi Presiden". Tempo. 31 Oktober 1999.
- Absussami, Humaidi dan Ridwan. *Biografi Lima Rais A'am Nahdlatul Ulama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995
- Abdullah, Amin. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Abdillah, Masykuri. "Agama dalam Pluralitas Masyarakat Bangsa." Kompas. 25 Februari 2000.
- Arifin, Imron. *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*. Malang: Kalimasahada Press, 1993
- Affandi, Arief. *Islam Demokrasi Atas Bawah polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan amien Rais*. Yogyakarta; Pustaka pelajar, 1997.
- Aziz, Ahmad Amir. *Neo-Modernisme Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Barton, Greg. *Gagasan Islam Liberal Di Indonesia: Pemikiran Neo Moderniosme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Enginer, Asghar Ali. *Devolusi Negara Islam* terj. Imam Muttaqin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Effendy, Bahtiar. *Repolitikasi Islam, Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?*. Bandung: Mizan, 2000.

- Fachruddin, Ahcmad. *Gus Dur Dari Pesantren Ke Istana Negara*. T.tp: Yayasan Gerakan Amaliyah Siswa (GAS), 1999
- Fealy, Greg dan Barton, Greg. *tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, terj. Ahmad Suaedy dkk. Yogyakarta; LkiS, 1997.
- Feillard, Andree. *NU Vis A Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna*. Yogyakarta: LkiS, 1999.
- Hidayat, Kamaruddin. "Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi," dalam Taher, Elza Peldi (ed). *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi, Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994.
- INCRES. *Beyond The Symbols: Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Kusuma, Mulyana W. *Menata Politik Paska Reformasi*. Jakarta: KIPP Indonesia, 2000.
- Kompas. *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman: Kumpulan Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Presiden ke-4 Republik Indonesia*. Jakarta: Kompas, 1999
- Malik, Dedy Djamaluddin dan Ibrahim, Idy Subandi. *Zaman Baru Islam Indonesia* Bandung; Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Masdar,Umaruddin. *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Pancasila*, Yogyakarta; Pustaka pelajar, 1999
- Ngatawi, al-Zastrow. *Gus Dur Siapa Sih Sampeyan? Tafsir Teoritik atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur*. Jakarta: Erlangga, 1999
- Nurcholish Madjid. "Demokrasi dan Demokratisasi di Indonesia: Beberapa Pandangan Dasar dan Prospek Pelaksanaannya Sebagai Kelanjutan Logis Pembangunan Nasional," dalam Taher, Elza Peldi (ed). *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994
- Ramage, Douglas E. "Pemahaman Abdurrahman Wahid tentang Pancasila Dan Penerapannya" dalam Dharwis, Ellyasa KH. *Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: LkiS, 1997.
- Soelastomo. "Dwi Tunggal Gus Dur-Mega." *Kompas*, 29 Nopember 1999.
- Wahid, Abdurrahman. "Antara Islam dan Asas Pancasila", dalam Basyaib, Hamid (ed). *Mengapa Partai Islam Kalah?*. Jakarta: Alvabet, 1999.
- ". "Mencari Sintesa Agama-Negara" dalam Sudarmanto, YB (dkk). *H. Mathori Abdul Jalil, Dari NU untuk Kebangkitan Bangsa*. Jakarta: PT. Grasindo, 1999.
- ". "Kata Pengantar" dalam Sitompul, Einar M. *NU dan Pancasila*. Jakarta: Sinar Harapan, 1989.
- ". *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LkiS, 1999

- . "Islam, Ideologi dan Etos kerja Indonesia." dalam Rahman, Budhy Munawar (Ed). *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 1994.
- . "Kongres Umat Islam Mencari Format Hubungan Agama Dengan Negara" dalam Parera, Frans M. dan Koekerits, T. Jakob. *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman Kumpulan Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Presiden ke-4 Republik Indonesia*. Jakarta: Kompas, 1999.
- . "Islam, Pluralisme, dan Demokratisasi," dalam Afandi, Arief. *Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur-Amien Rais*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- . "In Memoriam Kyai Achmad Siddiq." Dalam Nuh, Munawar Fuad dan HS, Mastuki. *Menghidupkan Ruh Pemikiran KH. Achmad Siddiq*. Jakarta: Logos, 1999.
- . "Sosialisasi Nilai-nilai Demokrasi." dalam Amin, M. Masyhur dan Najib, Moh. (ed). *Agama Demokrasi dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: LKPSM, 1993.
- . "Pribumisasi Islam." dalam Azhari, Muntaha (ed). *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*. Jakarta: Sinar Harapan, 1989.
- . "Salahkah Jika Dipribumikan." dalam Asa, Syu'bah dan Abdallah, Ulil Abshar. *Melawan Melalui Lelucon: Kumpulan Kolon Abdurrahman wahid di Tempo*. Jakarta: Pusat data dan Analisa Tempo, 2000
- . "Nasionalisme, Tasawwuf, dan Demokratisasi." Kompas. Tanggal 2 April 2001.
- "Gus Dur Agama dan Negara". Kompas, 25 Oktober 1999,